

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI KAMPUNG PANCASILA KELURAHAN REMBANG KOTA BLITAR

Lennin Kartika Eka Santosa Putri¹, Desinta Dwi Rapita²

Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia^{1,2}

Email: lennin.kartika.2107116@students.um.ac.id¹, desinta.fis@um.ac.id²

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 6 Bulan : Juni Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to describe the implementation of Pancasila values in Kampung Pancasila, Rembang Village, Blitar City. The type of research used is a descriptive qualitative approach. Data collection through observation, interviews, and documentation. Data sources from this study consist of primary data in the form of informants, events, documents and secondary data in the form of journal articles, literature books, government reports, government publications, reference books to meet writing standards. Data analysis techniques use several stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of Pancasila values in Kampung Pancasila, Rembang Village is manifested in various activities such as interfaith prayers, caring actions, mutual cooperation, musrembang, and cooperatives. The obstacles faced in the implementation of Pancasila values are the lack of community participation and the lack of activity budget. Efforts to overcome the obstacles of minimal community participation with a persuasive approach that is educational in nature and efforts to overcome the obstacles of minimal activity budget are by building intensive coordination with the Village and residents to obtain financial assistance or self-help.</i></p> <p>Keywords : Implementation, Pancasila Values, Pancasila Village</p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila Kelurahan Rembang Kota Blitar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer berupa informan, peristiwa, dokumen dan data sekunder berupa artikel jurnal, buku literatur, laporan pemerintah, publikasi pemerintah, buku referensi untuk memenuhi standar kepenulisan. Teknik analisis data menggunakan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila Kelurahan Rembang diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti doa lintas agama, aksi kepedulian, gotong royong, musrembang, dan koperasi. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila adalah minimnya partisipasi masyarakat dan minimnya anggaran kegiatan. Upaya dalam mengatasi hambatan

minimnya partisipasi masyarakat dengan pendekatan persuasif yang bersifat edukatif dan upaya dalam mengatasi hambatan minimnya anggaran kegiatan adalah dengan membangun koordinasi intensif dengan pihak Kelurahan dan warga untuk mendapatkan bantuan dana ataupun swadaya.

Kata Kunci : Implementasi, Nilai Pancasila, Kampung Pancasila

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi pertahanan pertama dalam menyaring berbagai gejala negatif multikultural. Indonesia sebagai salah satu negara multikultural atau majemuk dengan keberagaman baik dari segi agama, ras, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain (Widiasari dkk, 2023). Indonesia memiliki berbagai agama, ras, suku, budaya yang dianut dan diyakini oleh masing-masing masyarakat Indonesia. Perbedaan agama, etnis dan budaya kadang menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik sehingga Pancasila memiliki peran penting dalam menyatukan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi pondasi utama dalam membangun kesadaran kebangsaan yang kokoh.

Setiap bagian dari Pancasila bekerja sama secara harmonis (Binov handitya, 2019). Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila terbukti saling terkait satu sama lain. Nilai-nilai pancasila mempunyai keterkaitan antara nilai sila lainnya. Apabila salah satu nilai Pancasila diterapkan, maka nilai-nilai lainnya akan terlaksana. Hal ini dikarenakan setiap sila saling terikat erat dan berfungsi sebagai filter untuk menyaring pengaruh buruk dari luar agar tidak masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan bahkan satu nilai Pancasila akan menyebabkan prinsip-prinsip lainnya ikut berperan. Alasan di balik ini adalah bahwa setiap prinsip saling terkait dan berfungsi sebagai penghalang untuk menjaga pengaruh negatif dari luar ranah kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila adalah hasil dari pemikiran panjang pendiri bangsa yang bersumber pada keyakinan dan gagasan yang dihayati oleh masyarakat Indonesia.

Nilai Pancasila dasarnya adalah nilai filsafat yang didasarkan pada cita-cita bangsa Indonesia (Anggraini dkk. 2020). Nilai-nilai luhur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai tersebut diambil melalui pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat berdasarkan nilai norma dan etika yang terkandung dalam Pancasila. Di era globalisasi ini, setiap warga negara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar negara Indonesia dapat bertahan. Pancasila merupakan asas-asas dasar yang mengatur tentang manusia, alam, dan ketuhanan.

Masyarakat Indonesia harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui nilai dasar tersebut. Seluruh masyarakat Indonesia harus mencermati pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar tidak merugikan bangsa dan negara dengan cara menimbulkan perpecahan. Kenyataannya, perilaku menyimpang yang menimbulkan perpecahan sering dijumpai di masyarakat. Hal ini sebagai bukti nyata bahwa masih terdapat penyimpangan penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

Pada era globalisasi saat ini yang merujuk pada perubahan dinamika dunia berpengaruh pada lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam diri bangsa Indonesia. Persoalan dan tantangan Ideologi Pancasila hadir tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dapat muncul dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Permasalahan internal diantaranya adalah semakin mudarnya nilai-nilai dasar kehidupan dan norma-norma yang telah dijadikan pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila masih terjadi dalam berbagai bentuk di Indonesia. Pada penyimpangan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, penyimpangan tampak dalam aksi radikal yang dilakukan oleh suatu kelompok yang mengatasnamakan agama, yang bertentangan dengan prinsip toleransi. Penyimpangan pada sila kedua, penggusuran rumah warga tanpa jaminan atau bantuan dari pemerintah setempat mencerminkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Penyimpangan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, aksi separatis dan terorisme oleh OPM di Papua yang berlangsung sejak tahun 1965 hingga sekarang menjadi ancaman serius terhadap keutuhan bangsa. Penyimpangan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, tercermin dalam ketidakadilan hukum, seperti kasus nenek yang dihukum lebih berat dibandingkan hukuman untuk pelaku korupsi. Terakhir, pada penyimpangan sila kelima yaitu perbedaan perlakuan terhadap pasien yang menggunakan jalur umum dibandingkan pasien BPJS menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelayanan kesehatan (Hakim dan Dewi 2021). Diperlukan solusi agar tidak semakin banyak bentuk penyimpangan nilai-nilai Pancasila, salah satu strategi yang dapat digunakan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila adalah dengan mengadopsi model Kampung Pancasila sebagai upaya penguatan nilai-nilai Pancasila.

Kampung Pancasila merupakan sebuah inisiatif baru yang menjadi contoh penerapan cita-cita Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila sangat penting untuk penerapannya. Dusun atau komunitas yang menjadi contoh penerapan cita-cita Pancasila disebut Komunitas Pancasila ini (Widiasari dkk, 2023). Salah satu tujuan dari Kampung

Pancasila ini adalah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan nasional yang lebih kuat di antara masyarakat Indonesia dengan meningkatkan tingkat kesadaran patriotik dan patriotisme mereka. TNI AD meluncurkan inisiatif Kampung Pancasila, yang akan memanfaatkan satu lokasi di setiap kabupaten atau kota sebagai lokasi uji coba.

Pemerintah Kota Blitar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Blitar ke-116 Wali Kota Blitar bersama TNI AD setempat mengesahkan Kampung Pancasila dengan harapan semangat juang Bung Karno sebagai salah satu penggali Pancasila terus digelorakan di Kota Blitar (BlitarKota, 2022). Salah satu wilayah yang mendapatkan predikat adalah Kampung Pancasila Kelurahan Rembang Kota Blitar. Kelurahan Rembang resmi menjadi Kampung Pancasila pada tanggal 25 Maret 2022. Kampung Pancasila Kelurahan Rembang Kota Blitar memiliki keberagaman agama yang dipeluk oleh setiap masyarakatnya. Adanya masyarakat yang memeluk agama seperti islam, kristen, katolik, hindu dan budha serta terdapat tempat ibadah seperti kapel, gereja dan masjid yang berdampingan menjadi bukti bahwa kehidupan toleransi antar umat beragama di Kelurahan Rembang sangat kondusif. Selain itu, Kampung Pancasila Kelurahan Rembang ini berlokasi di tengah perkotaan sehingga banyak pendatang dari berbagai daerah yang bermukim di wilayah tersebut. Adanya masyarakat dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang sangat beragam berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat. Kampung Pancasila Kelurahan Rembang hadir sebagai program yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri bangsa Indonesia khususnya pada masyarakat Kelurahan Rembang. Mengingat perkembangan zaman memunculkan tantangan dan persoalan lunturnya nilai-nilai luhur Pancasila sehingga diperlukan upaya strategis dalam menumbuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, perlu kita pahami bersama bagaimanakah implementasi nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila Kelurahan Rembang Kota Blitar.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dimanfaatkan untuk mendapatkan data yang mendalam yang didasarkan pada kondisi objek ilmiah dengan memahami fenomena yang terjadi. Sedangkan, jenis penelitian deskriptif merupakan data yang dikumpulkan untuk menyajikan gambaran yang akurat sesuai kejadian di lapangan mengenai berupa kata-kata atau gambar sehingga dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada angka. Lokasi penelitian adalah Kelurahan

Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Data didapatkan melalui observasi cermat, wawancara mendalam, dan dokumentasi; 1) Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan pada kegiatan implementasi nilai Pancasila, 2) wawancara kepada Bapak Dwi Bowo sebagai ketua Kampung Pancasila, Ibu Maria Endang sebagai staff Kampung Pancasila, Ibu Ninis dan Ibu Asti sebagai warga di Kampung Pancasila, 3) mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan implementasi. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer berupa informan, peristiwa, dokumen dan sekunder berupa artikel jurnal, buku literatur, laporan pemerintah, publikasi pemerintah, buku referensi untuk memenuhi standar kepenulisan. Tiga bagian utama dari metode analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Kampung Pancasila Kelurahan Rembang Kota Blitar

Gagasan Kampung Pancasila menciptakan tatanan sosial dimana setiap orang tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengamalkan prinsip-prinsip luhurnya. Konsep Kampung Pancasila lahir sebagai representasi terhadap urgensi penguatan karakter bangsa melalui pembangunan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat nasionalisme, religiusitas, serta penghargaan terhadap keberagaman dalam bingkai persatuan yang harmonis. Implementasi Kampung Pancasila di Kelurahan Rembang dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dan partisipatif, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan menjaga kebersamaan, memperkuat solidaritas antar kelompok, serta menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam interaksi sosial (Widiasari dkk, 2023).

Penerapan konsep Kampung Pancasila di Kelurahan Rembang didasarkan pada landasan yuridis, yakni melalui Surat Keputusan yang merujuk pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dasar tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan program serta memperkuat arah kebijakan pemerintah daerah dalam membentuk masyarakat yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Implementasi Kampung Pancasila juga selaras dengan visi pembangunan Kota Blitar yang dikenal dengan akronim "KEREN", yaitu Keberagaman, Religius, dan Nasionalis yang menggambarkan tekad untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang toleran, bermoral, serta memiliki jiwa cinta tanah air. Kampung Pancasila

tidak sekadar menjadi entitas administratif, melainkan juga dikembangkan sebagai kampung tematik yang mengemban misi kebangsaan, dengan fokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat (BlitarKota, 2023).

Sila ke 1 Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Rembang dengan menjunjung tinggi nilai toleransi. Sikap toleran yang ditunjukkan masyarakat Kelurahan Rembang yaitu khususnya dalam hal menghargai perbedaan keyakinan (agama). Kelurahan Rembang sendiri memiliki keberagaman agama yang diyakini dan dipeluk oleh masyarakatnya seperti islam, kristen, katolik, hindu dan budha. Terdapat beberapa implementasi sebagai bentuk nyata bahwa masyarakat Rembang telah menjunjung tinggi nilai toleransi. Hal ini terlihat pada kegiatan doa lintas agama dan ketika hari besar masing-masing agama, warga Rembang saling bergantian melakukan silaturahmi ke rumah-rumah warga yang merayakan hari besarnya tanpa membedakan agama. Selain itu, pada proses implementasinya pengurus Kampung Pancasila memberikan sosialisasi pada masjid dan gereja terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan toleransi telah dicerminkan masyarakat Rembang dengan adanya sikap saling menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan masing-masing sehingga terbina kerukunan antar umat beragama di lingkungan Kelurahan Rembang. Bisa diketahui kembali bahwa masyarakat Rembang bukan hanya memeluk satu agama saja, melainkan terdapat beberapa masyarakat yang memeluk agama yang berbeda. Sikap toleransi menjadi penting ketika seseorang dihadapkan dalam suatu perbedaan. Toleransi itu sendiri, mencegah konflik dan menciptakan lingkungan yang harmonis.

Kegiatan keagamaan lintas iman telah menjadi bagian dari rutinitas sosial yang tidak hanya memperkuat solidaritas antar warga, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran spiritual kolektif. Salah satu praktik adalah pelaksanaan doa bersama lintas agama yang dilakukan secara rutin dan penuh penghormatan, mencerminkan semangat inklusivitas dan penghargaan terhadap keberagaman keyakinan sebagai bagian dari kekayaan sosial budaya. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi salah satu refleksi nilai-nilai ketuhanan yang menjunjung tinggi kedamaian, toleransi, dan rasa saling menghormati di tengah masyarakat majemuk (Dhini dan Syukur, 2024).

Kegiatan sosialisasi nilai-nilai Ketuhanan di Kampung Pancasila di Rembang tidak terbatas pada penyampaian materi secara teoritis, melainkan dilakukan secara langsung dan menyentuh aspek praksis kehidupan beragama, termasuk melalui kunjungan dan aktivitas di

berbagai tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai spiritualitas dan memperkuat kualitas keimanan setiap orang, sekaligus menumbuhkan sikap saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan lintas tempat ibadah tidak hanya memperkaya pengalaman keberagamaan, tetapi juga mencerminkan semangat kebhinekaan yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan semangat Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai dasar dengan menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai perbedaan keyakinan sebagai wujud konkret dari nilai toleransi.

Prinsip kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi fondasi yuridis bagi terbentuknya masyarakat yang inklusif dan menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Dalam kehidupan sosial masyarakat Rembang, prinsip tersebut diimplementasikan melalui praktik-praktik nyata yang mencerminkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan keyakinan. Salah satu bentuk konkret dari pengamalan nilai tersebut adalah tradisi saling berkunjung antar warga pada saat perayaan hari besar keagamaan. Tradisi saling berkunjung tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga menjadi simbol bahwa toleransi telah menjadi bagian yang menyatu dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, kerukunan yang terbangun bukanlah hasil dari paksaan struktural, melainkan lahir dari kesadaran kolektif yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur konstitusi dan Pancasila sebagai ideologi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945, Pasal 28E ayat (1).

Melalui praktik-praktik konkret yang dilakukan, implementasi nilai Ketuhanan dalam kehidupan masyarakat Kampung Pancasila di Rembang tidak lagi bersifat formalitas normatif semata, melainkan terwujud secara nyata dalam pola hubungan sosial yang harmonis dan inklusif. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa direfleksikan dalam bentuk penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, penguatan spiritualitas, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan lintas agama yang mencerminkan kehidupan beragama yang damai. Toleransi tidak hanya menjadi wacana moral, melainkan telah melebur sebagai nilai hidup bersama yang ditanamkan sejak usia dini melalui pendidikan keluarga dan lingkungan, serta terus dipelihara dalam setiap interaksi antarumat beragama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengamalan nilai Ketuhanan dalam Kampung Pancasila bersifat dinamis dan kontekstual, serta menjadi pondasi dalam menciptakan nilai sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Sila ke 2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Rembang menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap sesama dengan mengedepankan prinsip empati dan solidaritas tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun status sosial. Praktik-praktik sosial seperti saling membantu dalam kondisi darurat, partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta perhatian terhadap kelompok rentan menjadi bukti konkret bahwa nilai kemanusiaan telah terinternalisasi dalam kultur masyarakat. Penghormatan terhadap martabat manusia diwujudkan melalui interaksi yang dilandasi rasa keadilan, kesetaraan dan sikap saling menghargai, sehingga memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis.

Nilai Kemanusiaan merupakan kesadaran dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai moral yang berlaku, dilakukan atas dasar hati nurani (Ardhani dkk. 2022). Dalam implementasinya di Kampung Pancasila, nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia, tanpa memandang latar belakang agama, suku, ataupun status sosial. Sikap tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan sesama dengan penuh rasa hormat dan keadilan. Masyarakat Rembang tidak hanya memahami nilai kemanusiaan sebagai prinsip abstrak, tetapi juga mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata yang mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai etis dan kemanusiaan universal.

Penguatan kegiatan implementasi nilai kemanusiaan dalam masyarakat Kampung Pancasila juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dirancang secara edukatif dan partisipatif. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya pemahaman atas hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, sosialisasi juga diarahkan untuk menanamkan sikap adil dan berimbang dalam menjalin relasi sosial, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat tidak hanya diajak untuk memahami konsep-konsep normatif mengenai kemanusiaan, tetapi juga didorong untuk mengaktualisasikannya dalam bentuk perilaku yang menginternalisasikan rasa hormat terhadap sesama, kepedulian terhadap keadilan sosial, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sila ke 3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Rembang diwujudkan dalam budaya gotong royong yang telah menjadi bagian dari tradisi sosial di Kampung Pancasila. Kegiatan gotong royong yang telah dilakukan warga kelurahan Rembang seperti kerja bakti, pembersihan lingkungan, pembersihan tempat ibadah, serta perawatan fasilitas umum. Nilai kerja sama tidak terbatas pada aktivitas rutin seperti pembersihan lingkungan, tetapi juga tercermin dalam kepedulian sosial, seperti keterlibatan warga dalam membantu proses pembangunan rumah bagi sesama. Praktik gotong royong tersebut mencerminkan semangat yang mengedepankan kebersamaan, solidaritas dan rasa tanggung jawab bersama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Gotong royong dalam kehidupan masyarakat Kampung Pancasila tidak hanya dipahami sebagai aktivitas fisik semata, melainkan juga memiliki makna sosial yang mendalam sebagai sarana untuk mempererat ikatan kebersamaan dan membangun kohesi sosial antarwarga. Kegiatan gotong royong dilandasi oleh semangat sukarela, dimana warga saling membantu tanpa adanya paksaan, sebagai bentuk konkret dari kepedulian sosial dan rasa kekeluargaan yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Melalui praktik gotong royong, nilai solidaritas dan rasa saling memiliki dapat tumbuh secara alami, menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung terciptanya persatuan.

Negara mengatur kedaulatan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' mengandung makna bahwa keberagaman bukanlah suatu kelemahan, melainkan merupakan kekuatan yang menjadi fondasi bagi persatuan dan ketahanan bangsa. (Asmaroini 2016). Pemaknaan *Bhinneka Tunggal Ika* tercermin dalam kehidupan masyarakat Kampung Pancasila, dimana pluralitas suku, agama, dan budaya tidak dipandang sebagai potensi konflik, melainkan dijadikan sebagai aset sosial yang memperkaya interaksi antarkelompok. Keberagaman yang ada dimaknai secara positif dan diintegrasikan dalam berbagai aktivitas sosial yang mendorong terciptanya keharmonisan, toleransi, dan kerja sama antarwarga. Selain itu, masyarakat Kampung Pancasila berhasil menciptakan tatanan sosial yang inklusif dan solid, sekaligus mengaktualisasikan semangat persatuan dalam bingkai kebhinekaan sebagaimana diamanatkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Rasa solidaritas yang tinggi dan semangat persatuan yang terpelihara di tengah masyarakat Kampung Pancasila menjadi faktor dalam memperkuat nilai-nilai sosial, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan inklusif bagi seluruh warga tanpa memandang perbedaan identitas, baik dari segi agama, suku, maupun latar belakang sosial. Nilai persatuan

yang merupakan inti dari sila ketiga Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai semboyan simbolik, tetapi telah diwujudkan secara konkret dalam dinamika kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial yang harmonis, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Praktik kehidupan yang menjadikan persatuan sebagai landasan berpikir dan bertindak menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memahami pentingnya hidup rukun dalam keberagaman, tetapi juga secara aktif berperan dalam menciptakan integrasi sosial. Sila ke 4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Rembang dengan menekankan pentingnya nilai kerakyatan musyawarah untuk mencapai mufakat. Di kampung pancasila kegiatan musyawarah diwujudkan melalui MusRemBang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), difungsikan masyarakat sebagai wadah untuk berdiskusi dan merencanakan pembangunan secara bersama-sama.

Praktik kehidupan demokratis di Kampung Pancasila merupakan cerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu Nilai kerakyatan menekankan nilai yang menekankan manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan interaksi manusia antara satu sama lain sehingga dalam interaksi tersebut menghasilkan kesepakatan dan terjadi sikap menghargai demi tujuan bersama (Sianturi dan Dewi 2021). Keputusan yang dibuat melalui kesepakatan memerlukan prinsip musyawarah agar mencapai kata mufakat. Nilai kerakyatan mendorong masyarakat untuk mengedepankan diskusi yang konstruktif, menghargai perbedaan pandangan, serta mencari solusi terbaik yang mengutamakan kepentingan bersama. Masyarakat diberikan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah yang terbuka dan partisipatif. Forum-forum musyawarah dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, menyelesaikan permasalahan bersama, serta merumuskan kebijakan lokal yang mencerminkan kehendak kolektif. Hal tersebut tidak hanya memperkuat prinsip demokrasi deliberatif di tingkat komunitas, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, meningkatkan kualitas partisipasi warga dan memperkuat legitimasi sosial terhadap keputusan yang diambil.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu instrumen dalam pelaksanaan demokrasi partisipatif di Kampung Pancasila yang berfungsi sebagai forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan dan usulan terkait arah pembangunan di wilayah Kampung Pancasila. Mekanisme tersebut diselenggarakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), hingga ke

tingkat kelurahan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Proses musyawarah mengindikasikan keterbukaan dalam pengambilan keputusan publik serta menegaskan peran aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

Nilai kerakyatan sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila tidak terbatas pada partisipasi formal semata, melainkan diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan proses pembangunan. Partisipasi yang ada mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa warga tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Maka, semangat kerakyatan di Kampung Pancasila dihidupkan melalui interaksi yang egaliter antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan sinergi yang produktif dan memperkuat legitimasi sosial atas setiap kebijakan yang dihasilkan.

Sila ke 5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial yang menjadi substansi dari sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai Keadilan adalah nilai yang menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi (Sianturi dan Dewi 2021). Nilai ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kesempatan, perlakuan, serta kesejahteraan yang sama. Implementasi nilai Pancasila sila kelima diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Rembang melalui upaya pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya adalah penyediaan fasilitas ruang usaha berupa booth atau stand jualan yang dapat dimanfaatkan oleh warga, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal, memperluas akses terhadap peluang usaha, serta mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dengan adanya sarana tersebut, masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi ekonomi, sehingga tercipta ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkeadilan. Praktik demikian menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial di Kampung Pancasila tidak hanya dijadikan slogan, tetapi benar-benar diintegrasikan dalam strategi pembangunan berbasis kerakyatan.

Selain itu, keberadaan koperasi "PREMAN" (Pemuda Rembang Mandiri) merepresentasikan wujud nyata penguatan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip solidaritas dan nilai kebersamaan. Koperasi "PREMAN" berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif generasi muda

dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Melalui koperasi tersebut, para pemuda didorong untuk berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan kemandirian ekonomi komunitas, sekaligus menumbuhkan semangat kolaboratif dan tanggung jawab sosial. Model ekonomi berbasis koperasi mencerminkan upaya nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila dengan menekankan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dan penguatan kapasitas produktif masyarakat.

Berbagai program penguatan nilai-nilai Pancasila telah dirancang oleh pengurus Kampung Pancasila dan diwujudkan dalam praktik implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kehadiran Kampung Pancasila membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Masyarakat merasa bahwa nilai-nilai Pancasila telah melebur ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat tidak lagi merasa bingung dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut. Dengan kata lain, kehadiran Kampung Pancasila juga turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis (Widiasari dkk, 2023).

Hambatan dari Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Kampung Pancasila Kelurahan Rembang Kota Blitar

Implementasi nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila Kelurahan Rembang tidak seluruhnya berjalan dengan baik atau sesuai dengan harapan. Ada beberapa kegiatan yang kemudian mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

Pertama, minimnya partisipasi Masyarakat. Program yang dirancang pengurus Kampung Pancasila bersifat terbuka dan partisipatif. Namun, kenyataannya masih terdapat kelompok masyarakat yang menunjukkan sikap pasif, bahkan cenderung menutup diri. Fenomena ini mencerminkan belum sepenuhnya mengakarnya nilai-nilai kerakyatan dan semangat gotong royong di seluruh lapisan masyarakat, sehingga menjadi hambatan dalam mewujudkan integrasi sosial yang merata. Rendahnya keterlibatan aktif tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap tujuan program, minimnya komunikasi antarwarga, atau adanya ketimpangan dalam akses informasi.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Kampung Pancasila bukanlah fenomena yang terjadi tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Kesibukan, tingkat kesadaran yang rendah, serta ketidakpahaman terhadap urgensi dan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi beberapa

penyebab kurangnya keterlibatan warga. Dalam pandangan Sianturi dan Dewi (2021), nilai kerakyatan tidak hanya menekankan prinsip partisipasi formal, tetapi juga menuntut terbangunnya interaksi sosial yang aktif dan deliberatif sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan bersama. Ketika interaksi sosial tidak terwujud secara menyeluruh, maka makna substantif dari nilai kerakyatan cenderung mengalami degradasi, karena kehilangan konteks aplikatifnya dalam kehidupan bermasyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Kampung Pancasila semakin diperburuk oleh kurangnya koordinasi dan sinergi yang optimal antara pengurus Kampung Pancasila dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Ketidakefektifan komunikasi antara warga, pengelola program dan unsur pemerintahan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan berbagai inisiatif yang telah dirancang, sehingga mengurangi daya jangkauan dan efektivitas program. Kondisi demikian bertolak belakang dengan prinsip demokrasi partisipatif yang menjadi bagian dari nilai kerakyatan dalam Pancasila, dimana setiap elemen masyarakat seharusnya memiliki peran aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Kedua, minimnya anggaran kegiatan. Aspek pembiayaan merupakan salah satu hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program Kampung Pancasila di Kelurahan Rembang. Ketersediaan dana yang memadai menjadi faktor penentu bagi kelancaran dan kontinuitas berbagai kegiatan yang telah dirancang. Namun demikian, hingga saat ini Kampung Pancasila belum memiliki sumber pendanaan tetap, sehingga operasional kegiatan sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah kelurahan yang diperoleh melalui diskusi yang dilakukan oleh pihak terkait. Ketergantungan tersebut tidak hanya membatasi fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga menciptakan ketidakpastian terhadap kesinambungan kegiatan di masa mendatang.

Kondisi keterbatasan pendanaan dalam pelaksanaan program Kampung Pancasila di Kelurahan Rembang mencerminkan bahwa prinsip keadilan, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan akses terhadap sumber daya, masih belum sepenuhnya terealisasi secara merata. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi anggaran yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak dan efektivitas kegiatan yang dirancang untuk penguatan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana diungkapkan oleh (Ardhani dkk. 2022), nilai keadilan seharusnya menjamin terciptanya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal alokasi sumber daya dan dukungan kebijakan. Ketika pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara proporsional atau tidak menyentuh kebutuhan

yang paling mendasar, maka makna substantif dari keadilan menjadi bias dan sulit diwujudkan dalam praktik.

Sikap individualis warga yang terbatas hanya pada kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan pribadi, seperti membersihkan lingkungan sekitar rumah, namun enggan terlibat dalam aktivitas kolektif yang lebih luas di tingkat komunitas. Fenomena tersebut menunjukkan lemahnya semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang semestinya menjadi fondasi dalam membangun kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai persatuan dan gotong royong. Padahal, kedua nilai tersebut merupakan pilar dalam ideologi Pancasila yang menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana ditegaskan oleh (Ardhani dkk. 2022), bahwa keberhasilan pengamalan Pancasila sangat tergantung pada kesediaan individu untuk menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadaban.

Sikap individualis yang masih dijumpai di tengah masyarakat berpotensi melemahkan semangat. Dalam perspektif teori yang dikemukakan oleh (Simanjuntak dan Benuf 2020), nilai persatuan meniscayakan adanya kesadaran bersama yang kuat mengenai pentingnya kebersamaan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang bersifat komunal. Ketika kesadaran tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik, maka masyarakat cenderung mengalami disintegrasi sosial yang ditandai oleh melemahnya rasa tanggung jawab bersama dan meningkatnya kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.

Meskipun sebagian kelompok masyarakat di Kampung Pancasila tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan fisik atau operasional, namun tetap menunjukkan bentuk dukungan melalui kontribusi fungsional yang tak kalah penting. Dukungan tersebut diwujudkan, antara lain, melalui penyediaan konsumsi, bantuan dalam dokumentasi kegiatan, serta dukungan logistik lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan program. Bentuk partisipasi tidak langsung yang diberikan menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Sejalan dengan pemikiran Kaelan (2013), sebagaimana dikutip oleh Agus (2016), bahwa nilai-nilai instrumental dalam Pancasila bersifat fleksibel, memungkinkan adanya penyesuaian dengan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Fleksibilitas nilai-nilai instrumental tersebut mengandung makna bahwa pengamalan Pancasila tidak harus bersifat seragam atau mengikuti pola tertentu, tetapi dapat diwujudkan

melalui berbagai bentuk kontribusi yang relevan dengan kemampuan dan kondisi sosial masyarakat. Yang terpenting, setiap bentuk partisipasi tersebut tetap mengandung semangat gotong royong, solidaritas dan kebersamaan sebagai nilai-nilai inti dari Pancasila. Pendekatan demikian perlu untuk menjamin keberlanjutan partisipasi masyarakat serta menghindari eksklusivitas dalam pelaksanaan program-program berbasis nilai Pancasila. Dengan demikian, setiap warga, baik yang berperan aktif secara langsung maupun tidak langsung, tetap memiliki kontribusi bermakna dalam memperkuat implementasi nilai-nilai kebangsaan.

Upaya Mengatasi Hambatan dari Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Kampung Pancasila Kelurahan Rembang Kota Blitar

Kegiatan implementasi nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila tentu tidak lepas dari hambatan. Ada beberapa upaya yang dilakukan pengurus Kampung Pancasila dalam mengatasi hambatan sebagai berikut :

Pertama, upaya mengatasi minimnya partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat merupakan hal penting dalam mendukung keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila Kelurahan Rembang. Meskipun secara umum masyarakat menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi terhadap berbagai kegiatan yang diselenggarakan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian warga yang belum sepenuhnya terlibat secara aktif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pengurus Kampung Pancasila, terutama Ketua RT dan RW, mengambil langkah melalui pendekatan persuasif yang bersifat edukatif. Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan teguran langsung kepada warga yang belum menunjukkan partisipasi, bukan sebagai tindakan represif, melainkan sebagai sarana membangun kembali kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan dalam mewujudkan lingkungan yang harmonis, inklusif dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Partisipasi masyarakat dalam implementasi program Kampung Pancasila tidak selalu dimaknai secara sempit sebagai kehadiran fisik dalam setiap kegiatan, melainkan dapat terwujud dalam berbagai bentuk kontribusi yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing masyarakat. Dalam praktiknya, warga yang memiliki keterbatasan untuk terlibat langsung, seperti janda, lanjut usia, atau perempuan yang ditinggal suaminya bepergian, tetap diberikan ruang untuk berpartisipasi melalui cara-cara alternatif yang tetap bermakna. Salah satu bentuk partisipasi tersebut ialah pemberian bantuan swadaya berupa makanan dan minuman untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja bakti atau agenda sosial lainnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi sosial bersifat

multidimensional dan tidak bersifat eksklusif, serta mencerminkan prinsip inklusivitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep partisipasi masyarakat sebagaimana diterapkan di Kampung Pancasila Kelurahan Rembang sejalan dengan nilai kerakyatan yang tercantum dalam sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif untuk kepentingan bersama. Hal ini selaras dengan pandangan Sianturi dan Dewi (2021), menegaskan bahwa nilai kerakyatan menuntut adanya interaksi sosial yang produktif sebagai landasan dalam membangun kehidupan demokratis di tingkat komunitas. Di Kampung Pancasila, semangat tersebut tercermin dalam kesadaran warga bahwa keikutsertaan dalam berbagai kegiatan sosial bukan sekadar bentuk keterlibatan sukarela, tetapi merupakan perwujudan tanggung jawab moral dan kewarganegaraan.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Kampung Pancasila juga dilaksanakan melalui pendekatan edukatif yang bersifat inklusif dan menyentuh berbagai lapisan sosial. Strategi yang ada dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila tidak hanya kepada kelompok formal seperti karang taruna, tokoh masyarakat dan aparat kelurahan, tetapi juga secara aktif menyasar warga umum melalui forum keagamaan, pengajian, serta pertemuan kemasyarakatan lainnya. Pendekatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperluas pemahaman bahwa nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dimaknai sebagai konsep normatif atau teori semata, melainkan harus diinternalisasi dan diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Ardhani dkk (2022), menegaskan bahwa nilai kemanusiaan dalam Pancasila bertumpu pada kesadaran moral individu dan tindakan yang dilandasi oleh hati nurani sebagai manifestasi empati sosial. Dalam implementasinya di Kampung Pancasila, bentuk kontribusi warga yang memilih untuk menyumbangkan konsumsi atau bantuan logistik, meskipun tidak hadir secara langsung dalam kegiatan, merupakan cerminan nyata dari pengamalan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat gotong royong. Tindakan demikian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat dinamis dan fleksibel, sehingga dapat diinternalisasi dan dimaknai secara kontekstual sesuai dengan kapasitas serta kondisi sosial masyarakat.

Selain itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang bersifat inklusif dalam program Kampung Pancasila juga memperkuat implementasi nilai keadilan sosial, sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila. Dalam pelaksanaannya, seluruh warga diberi ruang dan kesempatan yang setara untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas, kondisi dan

kemampuan masing-masing, tanpa adanya paksaan maupun perlakuan diskriminatif. Prinsip inklusif menciptakan suasana kebersamaan yang harmonis, sekaligus mendorong terciptanya relasi sosial yang berlandaskan kesetaraan dan saling menghargai. Dengan memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk berpartisipasi secara proporsional, nilai keadilan tidak hanya menjadi slogan normatif, melainkan terealisasi dalam praktik kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi hak, martabat dan peran setiap warga secara adil. Keberhasilan dalam mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam program Kampung Pancasila sangat dipengaruhi oleh peran strategis pemimpin lokal yang mampu berfungsi sebagai teladan dan motor penggerak. Figur seperti Ketua RT, RW, serta pengurus Kampung Pancasila kerap menjadi inisiator dalam memobilisasi keterlibatan warga. Dengan menunjukkan keteladanan secara langsung, misalnya melalui keikutsertaan dalam kegiatan kerja bakti, doa bersama, atau kegiatan sosial lainnya, para pemimpin secara tidak langsung membangun kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Selain itu, tindakan yang dilakukan juga menumbuhkan semangat gotong royong dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut teori implementasi nilai-nilai Pancasila yang dikemukakan oleh Kaelan (2013), sebagaimana yang dikutip oleh Agus (2016), bahwa nilai praksis merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila yang terefleksi dalam tindakan nyata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Kampung Pancasila di Kelurahan Rembang, berbagai bentuk partisipasi aktif masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan representasi dari nilai praksis tersebut. Keikutsertaan warga dalam kegiatan sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya berhenti pada tataran normatif atau konseptual, tetapi telah diinternalisasi dan dijalankan dalam praktik kehidupan bermasyarakat yang dinamis, kontekstual, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Penguatan kesadaran dalam masyarakat Kampung Pancasila juga didorong melalui pola komunikasi lintas warga yang mengutamakan prinsip musyawarah sebagai landasan interaksi sosial. Praktik komunikasi tersebut tidak hanya terjadi dalam forum-forum resmi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi juga berlangsung dalam percakapan sehari-hari antarwarga yang secara aktif saling mengingatkan pentingnya kehadiran dan kontribusi dalam setiap kegiatan sosial. Melalui proses musyawarah, masyarakat tidak hanya diberdayakan untuk berpartisipasi, tetapi juga diajak untuk

membangun konsensus secara kolektif dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama.

Kedua, upaya mengatasi minimnya anggaran kegiatan. Pengurus Kampung Pancasila menyadari bahwa pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan, seperti sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, pelatihan kebangsaan, hingga kegiatan keagamaan, memerlukan dukungan penuh serta pendanaan yang memadai agar dapat terlaksana secara konsisten. Ketersediaan dana operasional menjadi faktor yang sangat mendukung dalam menjamin keberlangsungan program, mengingat tanpa dukungan finansial yang cukup, pelaksanaan kegiatan cenderung terhambat baik dari segi frekuensi maupun kualitas. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh pengurus Kampung Pancasila adalah membangun koordinasi intensif dengan pihak Kelurahan sebagai institusi pemerintahan terdekat, guna memperoleh dukungan pendanaan melalui jalur formal.

Meskipun dukungan pendanaan dari pihak kelurahan telah diupayakan, kenyataannya bantuan tersebut belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan operasional kegiatan Kampung Pancasila secara menyeluruh. Menghadapi keterbatasan tersebut, pengurus Kampung Pancasila mengambil langkah solutif dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui bantuan swadaya. Warga diajak untuk berkontribusi secara sukarela dalam bentuk penyediaan konsumsi, perlengkapan, atau kebutuhan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sosial. Inisiatif yang ada tidak hanya menjadi alternatif pragmatis dalam mengatasi keterbatasan anggaran, tetapi juga merupakan bentuk penguatan nilai-nilai gotong royong yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu *Persatuan Indonesia*. Melalui keterlibatan kolektif tersebut, terbangun solidaritas dan rasa memiliki yang memperkuat kohesi sosial serta menegaskan pentingnya partisipasi warga dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Upaya penggalangan swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan Kampung Pancasila tidak hanya mencerminkan semangat gotong royong, tetapi juga merepresentasikan implementasi nilai kerakyatan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila keempat dan kelima Pancasila. Proses pengumpulan kontribusi dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, dimana warga secara bersama-sama menyepakati bentuk dan jenis dukungan yang dapat diberikan, disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi masing-masing masyarakat. Gerakan tersebut menciptakan iklim partisipasi yang adil, tanpa membebani pihak tertentu, serta memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran bersama inilah yang menjadi fondasi dalam membangun nilai-nilai

sosial yang harmonis, sekaligus memperkuat keberlanjutan program berbasis nilai-nilai Pancasila di tingkat masyarakat.

Strategi pelibatan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan swadaya dalam pelaksanaan program Kampung Pancasila sejalan dengan pandangan (Ardhani dkk. 2022), bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila tidak cukup melalui pendekatan formal dan institusional semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang dilandasi oleh kesadaran moral kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika dihadapkan pada kendala, seperti keterbatasan anggaran yang diperlukan bukan sekadar ketergantungan pada bantuan eksternal, melainkan inovasi sosial dan semangat tanggung jawab bersama dari seluruh elemen warga.

Selain itu, teori yang dikemukakan oleh Kaelan dalam Agus (2016), menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila tidak cukup berhenti pada ranah normatif maupun instrumental, melainkan harus diwujudkan secara konkret dalam tindakan nyata yang mencerminkan internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi masyarakat Rembang melalui kegiatan swadaya untuk mendukung pembiayaan program-program Kampung Pancasila merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan nilai praksis tersebut. Tindakan yang dilakukan tidak hanya menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan, tetapi juga menegaskan bahwa mereka telah menempatkan diri sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan sosial. Artinya, masyarakat tidak lagi bersifat pasif sebagai penerima manfaat, melainkan berperan aktif dalam merancang, melaksanakan dan menopang keberlanjutan program berbasis nilai-nilai kebangsaan secara mandiri dan bertanggung jawab.

Kampung Pancasila Rembang mengimplementasikan pendekatan yang inklusif dalam proses penggalangan dana untuk mendukung keberlangsungan program-programnya, dimana kontribusi dari warga dilakukan secara sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing masyarakat. Tidak terdapat unsur paksaan dalam pelibatan partisipasi yang ada, melainkan mengedepankan prinsip kesetaraan dan kesadaran kolektif. Pendekatan tersebut mencerminkan pengamalan nilai keadilan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Sianturi dan Dewi (2021), bahwa keadilan dalam konteks kehidupan bermasyarakat terwujud melalui pemberian kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkontribusi, tanpa adanya diskriminasi atas dasar status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.

Mekanisme swadaya yang diterapkan dalam pelaksanaan program Kampung Pancasila juga berdampak dalam menumbuhkan rasa memiliki yang kuat di kalangan masyarakat

terhadap setiap kegiatan yang diselenggarakan. Warga tidak sekadar berperan sebagai peserta pasif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi yang menyeluruh memperkuat keterikatan emosional serta meningkatkan rasa tanggung jawab sosial kolektif, sehingga dapat mendorong terciptanya iklim partisipasi yang sehat. Hal tersebut mencerminkan implementasi nilai-nilai demokratis dan partisipatif sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila, yakni *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan* yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kehidupan bersama secara inklusif dan berkeadaban.

D. KESIMPULAN

Kampung Pancasila merupakan gambaran desa atau wilayah dimana masyarakatnya secara langsung maupun tidak langsung dapat mengamalkan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk implementasi nilai Pancasila yang telah diimplementasikan oleh masyarakat Kampung Pancasila seperti kegiatan doa lintas agama, sosialisasi, aksi kepedulian, gotong royong, musrembang, dan penyediaan fasilitas booth jualan untuk mendukung UMKM setempat. Dalam melaksanakan implementasi itu terdapat hambatan-hambatan yaitu minimnya partisipasi masyarakat dan minimnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan. Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut kampung pancasila mengupayakan hambatan partisipasi dengan pendekatan persuasif yang bersifat edukatif yang dilakukan oleh ketua RT atau RW setempat dan mengupayakan minimnya anggaran kegiatan, pengurus Kampung Pancasila adalah membangun koordinasi intensif dengan pihak Kelurahan dan warga kelurahan Rembang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A Aco. 2016. "Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi."
- Anggraini, Devi, Fauzal Fathari, Jordi Wahyu Anggara, dan Muhammad Devon Ardi Al Amin. 2020. "Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik* 2 (1): 11. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4945>.
- Ardhani, Marshandha Della, Irma Utaminingsih, Izzati Ardana, dan Riska Andi Fitriyono. 2022. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Gema Keadilan* 9 (2). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16167>.
- Asmaroini, Ambiro Puji. 2016. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa di Era

Globalisasi” 4 (2).

- Binov handitya. 2019. “Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. PDIH Unissula. 2(1)
- BlitarKota. 2022. Launching Kampung Pancasila Kelurahan Rembang Sebagai Hadiah Hut Kota Blitar. <https://blitarkota.go.id/berita/launching-kampung-pancasila-kelurahan-rembang-sebagai-hadiah-hut-kota-blitar>
- BlitarKota. 2022. Kelurahan Blitar dan Kelurahan Rembang Resmi Menjadi Kampung Pancasila Kota Blitar. <https://www.blitarkota.go.id/index.php/berita/kelurahan-blitar-dan-kelurahan-rembang-resmi-menjadi-kampung-pancasila-kota-blitar>
- Hakim, Aulia Nur, dan Dinie Anggraenie Dewi. 2021. “Pentingnya Implementasi Nilai Pancasila Agar Tidak Terjadi Penyimpangan Dalam Masyarakat Luas.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5 (1): 239–48. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1391>.
- Sianturi, Yohana R. U., dan Dinie Anggraenie Dewi. 2021. “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5 (1): 222–31. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>.
- Simanjuntak, Supriardoyo, dan Kornelius Benuf. 2020. “Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Diversi : Jurnal Hukum* 6 (1): 22. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.890>.
- Sugiyono, 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Widiasari, Emillia, Suwarno Widodo, dan Rosalina Ginting. 2023. “Peran Kampung Pancasila Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Toleransi di RW 03 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang” 7 (2).